



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILYANI SULISTYANDARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 278311

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 948.526.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/62 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 813 m2/64 m2 di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 32.616.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 1257 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 450.000.000
5. Tanah Seluas 2970 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 325.910.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 30.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 70.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 180.348.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.228.874.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.228.874.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.